

MANAJEMEN RETRIBUSI PASAR INPRES DESA BANGKIR KECAMATAN DAMPAL SELATAN KABUPATEN TOLI-TOLI

Ika Rezky Amalia¹⁾, Ani Susanti²⁾, Moh. Royfandi³⁾

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

ikarezkyamalia28@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

anisaqramullah@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

mohroyfandi788@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui manajemen retribusi pasar di Desa Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli. Dasar penelitian ini menggunakan dasar penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data skunder dan data primer. Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dengan menetapkan 9 (orang) informan yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun teori yang di gunakan yaitu George R. Terry, terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan yakni *plaining, organizing, actuating, dan controlling*. Faktor yang menyebabkan belum maksimalnya manajemen retribusi di pasar Desa Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli diantaranya, pendataan pedagan di pasar belum stabil, infrastruktur pasar yang belum bisa berfungsi dengan baik, dan kurangnya sosialisasi mengenai retribusi pasar turut mempengaruhi kurangnya kesadaran pedagang untuk mendukung retribusi.

Kata Kunci : Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan

ABSTRACT

This study aims to examine the management of market retribution in Bangkir Village, Dampal Selatan Subdistrict, Toli-Toli Regency. The research adopts a qualitative approach with a descriptive type of study. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Both primary and secondary data sources were utilized. Informants were selected using a purposive sampling technique, involving nine individuals considered to have adequate knowledge and understanding of the issues being investigated. The theoretical framework is based on George R. Terry's management theory, which emphasizes four key aspects: planning, organizing, actuating, and controlling. The findings indicate that the management of market retribution in Bangkir Village has not been fully effective. Contributing factors include inconsistent trader data, underutilized market infrastructure, and a lack of socialization or outreach regarding retribution policies, all of which have led to low awareness and compliance among traders.

Keywords: *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*

Submisi: 11-01-2026
Diterima: 12-01-2026
Dipublikasikan: 02-02-2026

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) adalah regulasi yang menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan sekaligus memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan daerah bukan hanya bersumber dari pajak, salah satunya seperti didanai dari berbagai sumber pendapatan lain seperti dana retribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Mengatur sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Vincent Kevin Rumengan, 2021)

Faktor yang menentukan keberhasilan penerimaan retribusi termasuk retribusi pasar adalah subyek (jumlah pedagang), obyek (luas kios, los, dan dasaran terbuka), tarif serta kinerja pemungutan (efisiensi dan efektivitas pemungutan) retribusi pasar. Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, maka penerimaan daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Mamuju, oleh karena itu keberadaan pedagang sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi pasar (Mustanir & Jusman, 2016).

Berbagai macam retribusi yang merupakan hasil dari pendapatan asli daerah tersebut salah satunya adalah retribusi pasar yang mempunyai tingkat kestabilan dan prospek yang baik untuk dikembangkan, retribusi pelaksanaannya hanya didasarkan pada peraturan daerah Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, penerimaan retribusi pasar akan mempengaruhi pendapatan asli daerah, apabila penerimaan retribusi pasar meningkat maka akan dapat pula mendukung peningkatan asli daerah. Pasar sangat memiliki potensi untuk kehidupan sehari-hari karena terjadinya aktivitas jual beli antara pedagang dan pembeli oleh karena itu sangat dibutuhkan masyarakat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 pasal 2 juga mengatur penataan pasar yakni (1) lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. (2) Pendirian Pasar Tradisional. Mengenai aturan retribusi pasar pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, yang isinya mengatur tentang pengumuman retribusi atas jasa pelayanan pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta. Efisiensi sektor publik merupakan

salah satu kunci menuju terciptanya daya saing nasional di tingkat pasar global. Dalam spiritualitas *reinventing government*, negara berusaha merekonstruksi dirinya pada semua tataran untuk bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai konsumen pelayanan publik.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Pasar Inpres di Desa Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli. Adapun jumlah pedagang yang ada di pasar inpres di Desa Bangkir di dalam los pasar berjumlah 29 lapak termasuk didalamnya penjual pakaian, sepatu/sendala dan kosmetik, Sedangkan di luar los pasar berjumlah 55 lapak, dan pemungut retribusi pasar hanya satu orang, adapun jumlah retribusi tahunan kurang lebih berjumlah Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) Peneliti melihat adanya masalah pada indikator Perencanaan (*planning*) proses perencanaan target pendapatan retribusi pasar dibeberapa daerah masih menghadapi sejumlah kendala, seperti tidak akuratnya data pedagang yang menjadi dasar perhitungan khususnya dipasar Desa Bangkir. Akibatnya target yang disusun sering kali tidak realistis dan tidak selaras dengan kondisi aktual dilapangan. pada indikator Pengorganisasian (*organizing*) tidak adanya pembagian kerja antar pengelola pasar karna kurangnya SDM, pada indikator Pelaksanaan (*actuating*) meskipun petugas retribusi berperan penting dalam memastikan kepatuhan pembayaran, masih ditemukan kurangnya sosialisasi dan komunikasi aktif yang dilakukan kepada pedagang, minimnya media informasi pendekatan yang kurang persuasif, serta belum dibentuknya komunikasi dua arah menjadi tantangan dalam mendorong kepatuhan dan transparansi dalam pemungutan retribusi pasar. sedangkan pada indikator *Pengawasan (controlling)*, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran belum dilaksanakan secara optimal yang berdampak pada efektivitas pengumpulan retribusi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pasar.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif. Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme. Metode ini digunakan untuk menyelidiki kondisi objek secara alamiah, berbeda dengan pendekatan eksperimen. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (kombinasi berbagai sumber), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada aspek perencanaan menunjukkan bahwa, Perencanaan target pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Toli-Toli belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu data jumlah pedagang yang fluktuatif setiap tahunnya dan kondisi sarana serta prasarana pasar yang belum memadai. Akibatnya, pencapaian target retribusi belum optimal karena partisipasi dan kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi masih rendah. Kondisi pasar yang rusak, terutama akibat kebakaran yang belum ditangani dengan perbaikan, turut menjadi faktor yang menghambat

kenyamanan pedagang dalam beraktivitas, sehingga berdampak pada tidak maksimalnya pendapatan daerah dari sektor retribusi pasar.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan tahap awal dalam manajemen yang bertujuan menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melaksanakannya, siapa yang bertanggung jawab, serta target yang ingin dicapai. Dalam pengelolaan retribusi Pasar Inpres Desa Bangkir, proses perencanaan dilakukan melalui penetapan besaran retribusi sesuai ketentuan yang berlaku serta penyusunan target penerimaan yang disesuaikan dengan jumlah pedagang aktif dan kondisi aktivitas pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa pemerintah desa bersama pengelola pasar telah melakukan perencanaan terkait pemungutan retribusi melalui penentuan jadwal penarikan, pembagian wilayah kerja petugas, serta identifikasi jumlah kios dan lapak yang menjadi objek retribusi. Langkah tersebut dimaksudkan agar proses pemungutan dapat berjalan lebih teratur dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antara petugas dengan para pedagang. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang dilakukan belum sepenuhnya optimal. Target penerimaan retribusi belum didasarkan pada data yang selalu diperbarui. Perubahan jumlah pedagang yang berjualan setiap hari belum seluruhnya tercatat dengan baik sehingga menyebabkan potensi penerimaan retribusi belum dapat dihitung secara akurat. Selain itu, belum terdapat dokumen perencanaan yang memuat strategi khusus untuk meningkatkan kesadaran pedagang dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa fungsi perencanaan masih bersifat sederhana dan lebih berorientasi pada kegiatan rutin. Padahal menurut G.R. Terry, perencanaan yang baik harus mampu memprediksi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan menyiapkan langkah antisipatif untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dengan demikian, pemerintah desa perlu melakukan pembaruan data pedagang secara berkala dan menyusun rencana pengelolaan retribusi yang lebih sistematis agar potensi pendapatan pasar dapat dimaksimalkan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek perencanaan dalam manajemen retribusi Pasar Inpres Desa Bangkir telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip perencanaan yang efektif sebagaimana dikemukakan oleh G.R. Terry. Perencanaan yang masih bersifat administratif menyebabkan pengelolaan retribusi cenderung berjalan berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung sebelumnya. Akibatnya, pencapaian target penerimaan belum didukung oleh data yang akurat dan strategi yang terukur. Perencanaan yang baik seharusnya tidak hanya berfokus pada penentuan target penerimaan, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kepatuhan pedagang, pemetaan potensi pasar, serta evaluasi terhadap hambatan yang sering terjadi dalam proses pemungutan retribusi.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan kepada setiap pihak yang terlibat dalam organisasi. Dalam pengelolaan retribusi Pasar Inpres Desa Bangkir, terdapat pembagian tugas antara pemerintah desa, pengelola pasar, dan petugas pemungut retribusi. Masing-masing pihak memiliki peran

dalam memastikan kegiatan pemungutan retribusi dapat berjalan sesuai ketentuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas pemungut telah memahami tugas utamanya, yaitu melakukan penarikan retribusi kepada pedagang dan menyetorkan hasil pungutan kepada pihak yang berwenang. Adanya pembagian tugas tersebut membantu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terarah. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam aspek pengorganisasian. Jumlah petugas yang tersedia dinilai belum sebanding dengan jumlah pedagang yang harus dilayani. Selain itu, belum terdapat pembagian tugas secara tertulis yang mengatur secara rinci mengenai tanggung jawab masing-masing petugas. Akibatnya, dalam situasi tertentu masih terjadi tumpang tindih pekerjaan dan ketergantungan pada individu tertentu. Di samping itu, koordinasi antara pihak pengelola pasar dengan pemerintah desa belum dilakukan secara rutin. Komunikasi lebih banyak berlangsung ketika muncul permasalahan di lapangan, sehingga penyelesaian kendala sering bersifat reaktif.

Menurut G.R. Terry, pengorganisasian yang baik harus mampu menciptakan hubungan kerja yang jelas antara individu maupun kelompok dalam organisasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa struktur pengelolaan retribusi Pasar Inpres Desa Bangkir telah terbentuk, tetapi efektivitasnya masih memerlukan penguatan. Kurangnya kejelasan pembagian tugas dan terbatasnya jumlah petugas dapat memengaruhi kinerja pemungutan retribusi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan organisasi yang lebih jelas melalui penyusunan uraian tugas (job description) serta peningkatan koordinasi antar unsur yang terlibat agar proses pengelolaan retribusi berlangsung lebih efektif.

3. Pelaksanaan atau Penggerakan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan proses menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam konteks pengelolaan retribusi Pasar Inpres Desa Bangkir, pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan penarikan retribusi secara langsung kepada pedagang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pedagang telah memahami kewajiban mereka untuk membayar retribusi sebagai bentuk kontribusi terhadap penyelenggaraan fasilitas pasar. Petugas pemungut juga berupaya memberikan penjelasan kepada pedagang mengenai pentingnya pembayaran retribusi bagi keberlangsungan pengelolaan pasar. Namun demikian, pelaksanaan pemungutan retribusi masih menghadapi beberapa hambatan. Tidak semua pedagang membayar retribusi secara rutin. Sebagian pedagang menunda pembayaran dengan alasan pendapatan yang tidak menentu, sementara sebagian lainnya menganggap bahwa fasilitas pasar yang tersedia belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut berdampak pada jumlah penerimaan retribusi yang tidak selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, proses pemungutan masih dilakukan secara manual sehingga pencatatan pembayaran rentan mengalami kesalahan administrasi. Sistem yang sederhana tersebut juga menyebabkan proses pelaporan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Berdasarkan teori G.R. Terry, keberhasilan pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinan dalam menggerakkan, memotivasi, dan membangun kerja sama dengan seluruh anggota organisasi. Dalam penelitian ini, petugas pasar telah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik, namun efektivitas pelaksanaan masih dipengaruhi oleh

rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pedagang dan keterbatasan sistem administrasi yang digunakan.

Peningkatan kualitas pelayanan pasar menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendorong kesediaan pedagang untuk membayar retribusi. Selain itu, penggunaan sistem pencatatan yang lebih tertib dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan retribusi pasar.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan retribusi Pasar Inpres Desa Bangkir, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan hasil pemungutan dan pencocokan antara jumlah penerimaan dengan laporan yang disampaikan oleh petugas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan oleh pemerintah desa melalui penerimaan laporan dari petugas pemungut. Namun, pengawasan yang dilakukan masih bersifat sederhana dan belum dilaksanakan secara berkala melalui pemeriksaan langsung di lapangan. Keterbatasan pengawasan menyebabkan potensi terjadinya ketidaksesuaian data penerimaan sulit terdeteksi secara cepat. Selain itu, belum terdapat mekanisme evaluasi yang dilakukan secara rutin untuk menilai efektivitas pengelolaan retribusi pasar.

Menurut G.R. Terry, pengawasan tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berada pada jalur yang telah direncanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dalam manajemen retribusi Pasar Inpres Desa Bangkir masih perlu diperkuat.

Pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan akan membantu pemerintah desa mengetahui berbagai hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan retribusi. Dengan adanya evaluasi yang rutin, perbaikan terhadap sistem pengelolaan dapat dilakukan lebih cepat sehingga tujuan peningkatan penerimaan retribusi dan pelayanan pasar dapat tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen retribusi Pasar Inpres Desa Bangkir Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli belum berjalan secara optimal. Dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan dimana pada perencanaan penentuan target retribusi di Kabupaten Toli-Toli belum efektif sedangkan untuk perorganisasian di wilayah Dampal Selatan itu diserahkan pada pihak ketiga, serta terdapat perbedaan antara pernyataan aparat dan kondisi di lapangan terkait penyampaian informasi retribusi, yang mencerminkan lemahnya komunikasi dan koordinasi pelaksanaan dan untuk pengawasan secara rutin pelaporan dilaporkan setiap bulan ke UPTD pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustanir, A., & Jusman. (2016). Implementasi Kebijakan dan Efektivitas Pengelolaan terhadap Penerimaan Retribusi di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Akmen*, 13(3), 542–558. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/69>
- Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafie, Tandjung, Modeong. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rumengan, V. K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/31425>

TENTANG PENULIS